

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era Globalisasi sekarang ini, terjadi perubahan drastis dalam panggung politik internasional, dimana isu-isu yang mendominasi dalam hubungan antar negara beralih dari isu-isu politik keamanan ke isu-isu ekonomi. Hal ini menuntut negara-negara di dunia untuk melakukan hubungan penuh perdamaian dengan berbagai negara. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepekaan negara-negara terhadap interdependensi ekonomi. Dan akibat selanjutnya adalah berkurangnya hubungan antar negara yang bersifat *state centric* dan kurang diperhatikannya lagi batas-batas wilayah geografis karena negara-bangsa sering disusupi oleh aktor lain seperti bangsa-bangsa yang lain maupun aktor non negara. Adanya fenomena pada hubungan internasional seperti ini untuk kemudian dikenal dengan *Hubungan Transnasional*.

Salah satu yang ikut menandai hubungan transnasional yang semakin tidak bisa dihindari keberadaannya adalah kerjasama luar negeri pada taraf kerjasama sub bilateral yaitu program *Kerjasama Internasional*. *Kerjasama Internasional* disini maksudnya adalah hubungan kemitraan antara provinsi di Indonesia dengan negara bagian atau non-negara di luar negeri atas dasar keinginan atau kepentingan dan kemanfaatan bersama.

Salah satu bentuk realita dari hubungan transnasional dalam bentuk kerjasama internasional adalah Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe, Jerman dalam Program Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin di Gunung Kidul. Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 2000 hingga sekarang masih berlanjut. Kerjasama ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Gunung Kidul. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis pada kesempatan ini akan membahas Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe, Jerman dalam Program Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin di Gunung Kidul.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang identik dengan kekeringan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa daerah karst di Gunung Kidul memiliki sumber aliran air sungai bawah tanah yang melimpah dan mengalir di lorong-lorong Goa Bribin yang terbuang sia-sia ke Baron. Apabila kita mampu untuk memanfaatkannya dalam mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul, maka hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat Gunung Kidul. Tugas Pemerintah RI *c.q.* Pemerintah Provinsi DIY untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah di daerahnya khususnya mengenai masalah kekeringan di Gunung Kidul. Dalam kurun waktu 1992-2003, Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul dengan cara memanfaatkan air sungai bawah tanah yakni eksploitasi air sungai bawah tanah Bribin yang menggunakan generator untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga untuk menggerakkan pompa air membutuhkan bahan bakar

solar yang biaya operasionalnya mencapai 130 juta/tahun. Besarnya biaya operasional itu menyebabkan harga air yang diperoleh masyarakat sangat mahal. Dengan kondisi seperti itu, Pemerintah Provinsi DIY berkeinginan mencari alternatif solusi lain untuk mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul.

B. Tujuan Penelitian

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Membahas kerjasama internasional antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe, Jerman dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin di Gunung Kidul.
2. Menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap realita yang ada sehingga dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
3. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Dari uraian alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya adalah :

“ Bagaimana Pemerintah Provinsi DIY mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul ?”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka digunakan konsep sebagai berikut:

1. Kerjasama Internasional

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa lepas hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, hubungan yang terjadi ini disebut interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan-hubungan yang dinamis antara orang-perorang, antara kelompok manusia, maupun antar manusia dengan orang-perorang. Bentuk interaksi juga dapat dilihat antar Negara yang selanjutnya dikenal sebagai hubungan internasional. Secara umum hubungan internasional yang dilakukan antar Negara unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya¹.

Sejalan dengan perkembangan pesat dalam dunia internasional menyebabkan Negara bukan lagi aktor dominan melainkan muncul aktor-aktor lain yang tak kalah penting seperti organisasi

¹ Theodore A Coulombis & James Wolfe. alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan*

internasional, kekuatan perorangan atau bahkan individu yang berpengaruh, yang mengadakan berbagai rangkaian aksi dan reaksi yang membentuk kerjasama disebut "Hubungan Internasional"².

Flo Frank dan Anne Smith (2000) menyatakan bahwa kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama.³ Kerjasama adalah tentang orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian. Dalam acuan Intergovernmental Cooperation, kerjasama antar pemerintahan didefinisikan sebagai susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan satu sama lain secara bersama-sama.⁴

Dari kedua definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih daerah di Indonesia dengan pihak luar negeri, yang dilakukan

² Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional : *Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, Bina Cipta, 1987, hal.1

³ Flo Frank and Anne Smith, dalam *Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah*, LAN, Jakarta, 2004, hal:13.

⁴ *Ibid.* hal:14.



dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berkaitan dengan pengertian kerjasama internasional, *Dr. Budiono Kusumohamidjojo*, “Sikap Kooperatif dalam menyelenggarakan politik luar negeri senantiasa dapat dikembalikan kepada asumsi bahwa persoalan tertentu tidak dapat diatasi, atau sasaran tertentu tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Sikap kooperatif juga dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan membawa dampak yang menguntungkan, bila dibandingkan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi pada umumnya juga didasari bahwa kerjasama internasional senantiasa membawa konsekuensi tertentu. Namun demikian, suatu kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara proporsional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung”⁵.

Kerjasama internasional itu sendiri ⁶adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

⁵*Ibid*, hal. 33

⁶ *ibid*, hal. 33 (diakses 12 April 2009); diambil dari <http://www.wikipedia.com>

Sedangkan menurut K.J Holtsi, kerjasama internasional didefinisikan :

“ Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik.”⁷Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak proses ini disebut kerjasama.

Dalam mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul, Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan pihak luar negeri yang dirasa mampu yakni Universitas Karlsruhe Jerman yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengelolaan teknologi dan regenerasi sumber air sungai bawah tanah di daerah karst. Kerjasama internasional yang terjalin antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman terjalin karena adanya kesamaan kepentingan antara kedua belah pihak yakni disisi pemerintah Provinsi DIY yang berusaha mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul dan dari pihak Universitas Karlsruhe sendiri sedang melakukan penelitian di daerah karst.

⁷ K.J. Holsti, “*Politik Internasional Studi Analisis Jilid 1*”, Erlangga, Jakarta, 1998, Hal:89.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri."

Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.⁹

Dalam rangka tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

⁸ Eddy Pratomo, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 53.

⁹ Otonomi Daerah (diakses 2 Desember 2008): diambil dari [http://www.wikipedia.com/Otonomi Daerah](http://www.wikipedia.com/Otonomi%20Daerah)

Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actors*).¹⁰

Undang-undang Nomor 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah telah merefleksikan otonomi daerah dengan memberikan ruang atas kebijakan-kebijakan guna mengelola daerahnya baik propinsi maupun kabupaten. Dalam undang-undang ini telah memberikan hak yang sangat tinggi terhadap setiap daerah dalam mengatur kebijakan-kebijakan daerah dalam mendukung program-program pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dengan semangat otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia

... untuk berinteraksi

secara langsung dengan daerah atau wilayah di luar negeri sehingga terbentuk kerjasama internasional. Pemerintah Daerah Propinsi Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, terus berupaya mengatasi masalah di daerahnya khususnya dalam hal ini di Gunung Kidul. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memeberikan keleluasaan bagi daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain baik di dalam maupun luar negeri.

Pemanfaatan Sumber Daya yang ada didalam suatu daerah termasuk Sumber Daya Alam merupakan wewenang dari daerah untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Sebagian permukaan Karst yang ada di Gunungkidul berfungsi sebagai inden penampungan air yang besar untuk menyuplai air yang ada di seluruh kawasan karst. Sehingga dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe dalam proyek Bribin, nantinya tujuan dari Pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi kekeringan di Gunung Kidul dapat teratasi.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut:

“Pemerintah Provinsi DIY mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul dengan melakukan Kerjasama Internasional dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gunung Kidul”

F. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini perlu membatasi jangkauan penelitian agar dalam penulisan dapat lebih terarah dan mudah memahaminya. Adapun pembatasan ruang lingkup penulisan skripsi ini difokuskan pada bergulirnya “Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe , Jerman dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah Goa Bribin di Gunung Kidul”, terhitung setelah penandatanganan MoU pada tanggal 29 Oktober 2003 (yang kemudian diperbaharui pada tahun 2004) sampai sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan data dan bahan penulisan di luar waktu tersebut pun akan dituangkan dalam penulisan ini, jika data dan bahan penulisan tersebut dirasakan sangat penting dan berguna.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat primer yakni melalui wawancara langsung dengan Staf Badan Administrasi dan Penanaman Modal Asing Provinsi DIY mengenai perkembangan Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin.

Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pustaka seperti buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dokumen, arsip, laporan kegiatan

simposium atau workshop tentang Proyek Bribin yang saya peroleh dari Badan Administrasi dan Penanaman Modal Asing Provinsi DIY, maupun sumber lain seperti koran, majalah, internet, makalah seminar yang tentunya berkaitan dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dan Universitas Karlsruhe dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin di Gunung Kidul.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan gambaran umum mengenai Gunung Kidul yang mengalami kekeringan akan dibahas dalam bab ini.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang masalah kekeringan di Gunung Kidul dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY.

BAB IV : Bab ini membahas tentang Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Program Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah Bribin di Gunung Kidul sebagai solusi dalam mengatasi masalah kekeringan di Gunung Kidul.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan yang di dapat dari keseluruhan bab-bab sebelumnya.